



INTISARI

Permasalahan permukiman di perkotaan Indonesia tidak pernah terlepas dari kekumuhan. Hal tersebut terjadi pula di Kota Surakarta. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun pemerintah kota berupaya untuk mengatasinya. Program Kota Tanpa Kumuh merupakan salah satu bentuk program yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur pelayanan permukiman. Program tersebut menyasar pada pembenahan *squatter* dan *slum area* di perkotaan. Salah satu bentuk implementasi program tersebut dapat terlihat pada Segmen II RW 01 Mojo Kelurahan Mojo. Hal yang menarik pada program ini terletak pada konsep penataan kawasan yaitu menata tanpa menggusur pada lahan ilegal sempadan sungai dan menerapkan strategi *land consolidation*. Dengan demikian, diperlukan evaluasi mengenai capaian implementasi program dan diperlukan ulasan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian program. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif campuran. Data yang didapatkan berasal dari hasil kuesioner, wawancara, dan kajian dokumen. Penelitian ini mengamati capaian implementasi program di Segmen II RW 01 Mojo, masyarakat terdampak, dan pelaksana program. Kemudian hal yang dianalisis berupa respon dari masyarakat terdampak dan respon dari pelaksana program terhadap capaian implementasi program dan faktor-faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap capaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian implementasi program termasuk dalam kategori berhasil. Hal tersebut disebabkan pada program ini telah mencapai nilai optimal pada kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keberlanjutan. Sementara itu, sumber daya, komunikasi, disposisi, dan kondisi lingkungan sosial mengindikasikan adanya pengaruh terhadap capaian program. Namun, di sisi lain ditemukan faktor lain yang mendukung secara kuat terhadap faktor disposisi dan sumber daya. Faktor tersebut adalah faktor komitmen dan kepemimpinan kepala daerah serta faktor kolaborasi antar stakeholder.

Kata kunci: Evaluasi, Permukiman Kumuh dan Ilegal, Konsolidasi Lahan, Program Kota Tanpa Kumuh, Kelurahan Mojo



ABSTRACT

The problem of settlement in Indonesia's urban areas is never separated from the slum area. This happened too in Surakarta. Therefore, the central government and the city government are working to address this. The National Slum Upgrading Program is one form of the central government issued program in increasing access to settlement service infrastructure. The program targets squatter refinement and slum areas in urban areas. One of the implementations of the program can be seen in Segment II RW 01 Mojo Kelurahan Mojo. The interesting thing about this program lies in the concept of arranging the region is to organize without displacing on illegal land of river boundaries and implementing land consolidation. Therefore, evaluation of the achievement of the program implementation is required and reviews of the factors that affect the achievement of the program. This research was done using a deductive mixed-method. The data obtained comes from questionnaires, interviews, and document studies. The study looked at the achievement of the program implementation in Segment II RW 01 Mojo, the affected community, and the implementing of the program. Then the analyzed in the form of response from affected communities and the response from program implementers to achieve program implementation and factors indicated to affect the achievement of the program. The results of the study showed that the achievements of the program implementation fall into the category successfully. This is because the program has achieved optimal value on the criteria for evaluation of effectiveness, efficiency, responsiveness, and sustainability. Meanwhile, resources, communication, disposition and social environmental conditions indicate an influence on the achievement of the program. However, on the other hand, other factors are found that affect disposition and resource factors. These factors are the leadership factors of regional heads and collaboration between stakeholders.

Keywords: Evaluation, Slum and Squatter Area, Land Consolidation, National Slum Upgrading Program, Kelurahan Mojo